

# **IMPLEMENTASI STRATEGI PERTAHANAN PULAU- PULAU BESAR DALAM MEWUJUDKAN SYSTEM PERTAHANAN YANG KUAT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN HYPERACTIVE WARFARE DENGAN BASIS SISHANKAMRATA**

OLEH:  
Kolonel Inf Charles Alling, SE, M.MDS

## **PENDAHULUAN**

Era saat ini ditandai dengan kondisi global yang sangat serta kemajuan teknologi yang sangat pesat ini. Stabilitas internasional yang selama ini terbangun pasca era Perang Dingin mengalami tantangan dengan melihat percaturan great power politics yang ditandai dengan makin kompleksnya tantangan dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tantangan terbesar adalah ancaman Hyperactive Warfare, yang secara singkat dapat dimaknai dengan bentuk peperangan yang melibatkan penggunaan teknologi canggih dan taktik yang

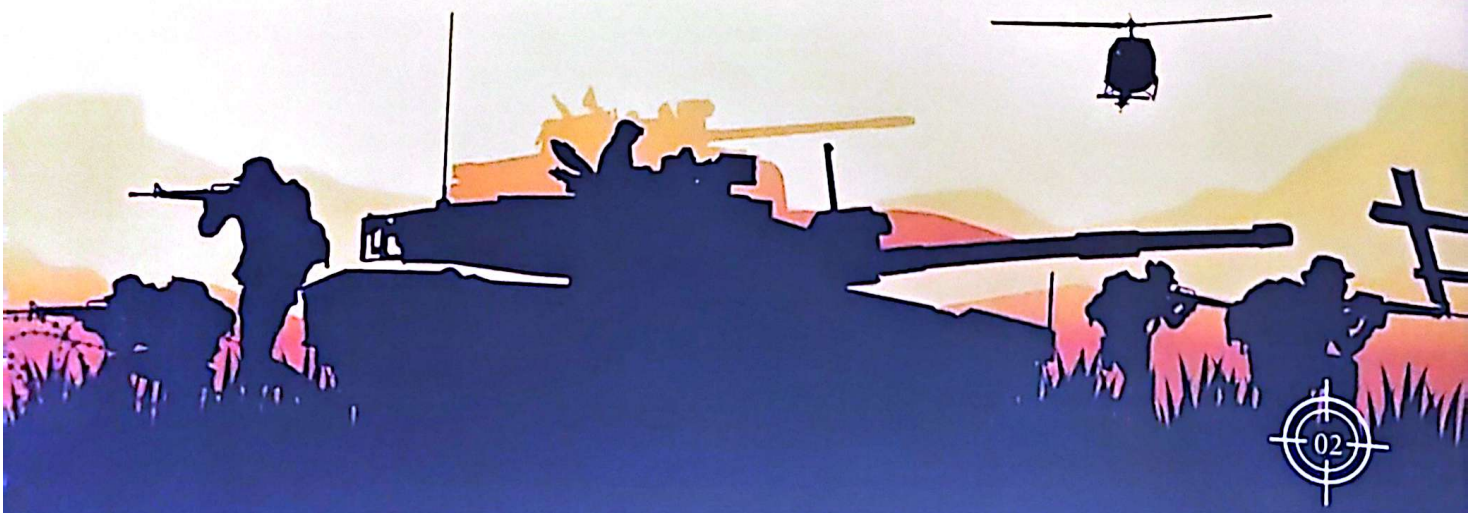


dinamis dan cepat, melibatkan persenjataan presisi tinggi, serta integrasi ranah siber dan dunia nyata. Dalam menghadapi ancaman ini, strategi pertahanan yang kuat dan efektif sangat dibutuhkan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan unik dalam mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasionalnya. Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar menjadi salah satu pilihan yang strategis dalam konteks ini. Strategi ini melibatkan pemanfaatan sumber daya dan posisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia untuk membangun sistem pertahanan yang kuat dan tangguh.

Untuk mencapai implementasi strategi dalam menghadapi dinamika ancaman dan lingkungan strategis, diperlukan pemahaman tentang berbagai aspek, mulai dari geopolitik, teknologi militer, hingga manajemen pertahanan. Selain itu, Doktrin Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) juga harus menjadi landasan dalam setiap langkah yang diambil.

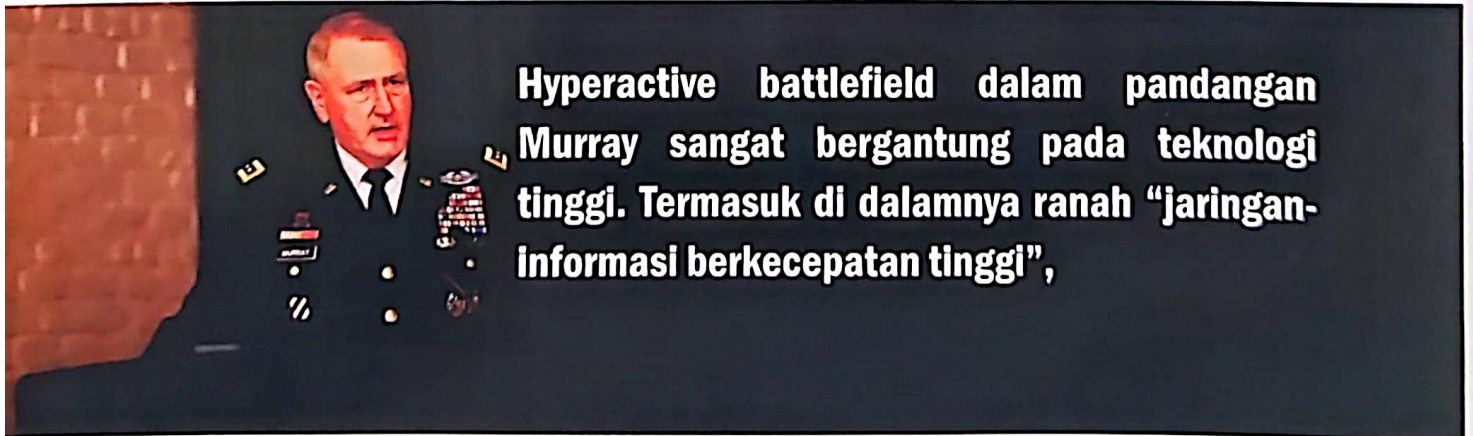
Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana implementasi strategi pertahanan Pulau-Pulau Besar dapat mewujudkan sistem pertahanan yang kuat dalam menghadapi ancaman *Hyperactive*



*Warfare* dengan basis Sishankamrata. Pemaparan tulisan ini akan berusaha mengeksplorasi berbagai aspek penting dalam konteks ini, termasuk peran teknologi, manajemen sumber daya, dan partisipasi masyarakat dalam sistem pertahanan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan serta para prajurit di lapangan.

## PERTEMPURAN MASA DEPAN

General John Murray, Komandan US Army Future Command memperkirakan bahwa peperangan dan medan pertempuran di masa depan adalah sebuah medan yang hiperaktif (hyperactive battlefield).



**Hyperactive battlefield dalam pandangan Murray sangat bergantung pada teknologi tinggi. Termasuk di dalamnya ranah “jaringan-informasi berkecepatan tinggi”,**

pemutakhiran perangkat lunak yang mencakup kecerdasan buatan, penginderaan jarak jauh, kapabilitas siluman, senjata presisi tinggi, dan, mungkin yang terpenting, siklus keputusan sensor-ke-penembak <sup>(1)</sup>. Kondisi ini menuntut pengambilan keputusan dan metode pertempuran yang membutuhkan

(1) Kris Osborn, "Future Wars Will Be Fought on the 'Hyperactive Battlefield,'" *The National Interest*, July 4, 2021, diakses 13 Mei, 2023, <https://nationalinterest.org/blog/buzz/future-wars-will-be-fought-%E2%80%98hyperactive-battlefield%E2%80%99-189096>.

penguasaan teknologi tinggi dan proses pengambilan keputusan, pengambilan tindakan, dan manuver yang sangat cepat.

Pada akhirnya, konteks-konteks modern tersebut berkaitan erat dengan pembangunan kapabilitas, dimana analisa terhadap kapabilitas yang dibangun berkaitan erat dengan skenario lingkungan strategis (lingstra) di sekitar Indonesia dan proyeksi ancaman yang dibentuk. Skenario lingstra dan proyeksi ancaman merupakan bagian penting dari penentuan dan pembentukan



kapabilitas yang diarahkan untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan yang dapat mengancam kondisi keamanan IKN.

Secara konkret, sejak awal tahun 2000-an, perkembangan-perkembangan yang terlihat pada pembangunan kapabilitas militer sudah terlihat cukup jelas. Perkembangan-perkembangan ini sudah melampaui sekedar proses modernisasi, akan tetapi sudah bergeser lebih jauh ke arah transformasi yang lebih fundamental terhadap cara bagaimana peperangan akan



dilaksanakan di era yang akan datang <sup>(2)</sup>. Hal ini dikarenakan proses akuisisi yang dilaksanakan kearah kapabilitas yang menekankan pada akurasi, lethality, kemampuan kordinasi dan komando, serta peningkatan jarak dan kendali pertempuran. Konsekuensi dari perkembangan ini adalah pertempuran di masa yang akan datang akan lebih bersifat high tech seperti pendapat John Murray dengan cara yang lebih cepat, jarak yang lebih jauh namun dengan ketepatan tinggi, dan hasil yang lebih mematikan <sup>(3)</sup>.

Indonesia tidak mungkin terpisah dan berada diluar dari fenomena perkembangan teknologi dan perkembangan kapabilitas tersebut. Secara umum dapat disimpulkan berdasarkan uraian bahwa terdapat tiga konteks besar yang memiliki dampak langsung pada lingkungan strategis dan kapabilitas militer, konteks tersebut antara lain

- (1) Proliferasi dan improvisasi teknologi dan informasi,**
- (2) Perkembangan sistem senjata otonom,**
- (3) Proliferasi teknologi siber.**

(2) Richard A. Bitzinger, "The Asia-Pacific Arms Market: Emerging Capabilities, Emerging Concerns," Asia-Pacific Security Asia-Pacific Security Studies 3, no. 2 (March 1, 2004)

(3) Ibid.



Ketiga ruang perkembangan besar tersebut tidak termasuk perkembangan sistem persenjataan secara konvensional. Walaupun demikian, penting untuk dicatat bahwa perkembangan konvensional turut pula mencapai perkembangan baru yang termasuk di dalam ketiga konteks tersebut. Perkembangan ini masih sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat tetap diperlukannya keberadaan fisik manusia dalam pelaksanaan setiap pertempuran sebagaimana terlihat dalam konflik belakangan ini.

## KONTEKSTUALISASI INDONESIA

Perkembangan metode pertempuran ini mengharuskan Indonesia untuk mampu lebih bijak dalam memandang diri dan lingkungan strategisnya. Analisa lingkungan strategis dan persiapan-persiapan pertahanan nasional perlu disinergikan untuk mampu menghasilkan kapabilitas terbaik untuk menjawab setiap dinamika tantangan yang ada.

Lingkungan strategis Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain letak geografis, dan perkembangan dinamika keamanan global. Faktor-faktor ini secara umum merupakan bagian dari realita geopolitik Indonesia. Secara khusus pada faktor geografis dan keamanan, posisi geografis Indonesia penting dalam perekonomian global, terutama jalur perdagangan global melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).







Realita geopolitik ini menjadikan Indonesia pada posisi yang sangat dinamis dan memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pertahanan. Pada satu sisi menciptakan peluang terbaik untuk kerjasama internasional, dan pada sisi lain memastikan perkembangan kepentingan nasional tidak memengaruhi keamanan regional secara negatif. Penting untuk dicatat bahwa lingkungan strategis bersifat dinamis, dan keadaan geopolitik dapat berkembang seiring waktu.

Dalam konteks perencanaan pertahanan, maka salah satu pendekatan yang dapat dikedepankan untuk kondisi yang sangat dinamis ini adalah perencanaan berbasis kapabilitas (CBP). Sebagaimana dirumuskan oleh Paul K. Davis, CBP adalah sebuah bentuk konkret dari *planning for adaptiveness* atau perencanaan adaptif. Atas permintaan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US DoD), Davis mengangkat bahwa





**US DoD masih menggunakan sistem perencanaan rigid, nonrealistic, monolitik, dan berbasis stereotyping dan dengan demikian tidak mampu beradaptasi atas kondisi yang tiba-tiba muncul <sup>(7)</sup>.**

Poin-poin penting dari perencanaan adaptif tujuannya adalah fleksibilitas, adaptasi, dan ketahanan dibandingkan optimasi; Penekanan pada kapabilitas modular yang dapat digunakan melalui beragam cara terkait dengan kemampuan penyelarasan kapabilitas lain; dan fokus kepada kebutuhan atas pilihan yang ada di dalam keterbatasan ekonomi <sup>(8)</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa secara prinsip, CBP bertujuan untuk mengadopsi kedinamisan kondisi dunia dalam proses perencanaan pertahanan. Dengan tidak berpatokan pada jenis ancaman atau sumber ancaman tertentu, diharapkan dalam pengadopsian CBP negara dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis maupun hadirnya ancaman.

Perencanaan berbasis CBP ini juga dapat disinergikan dengan basis realita strategis Indonesia dengan Doktrin Sishankamrata maupun Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2022 **secara umum strategi pertahanan pulau-pulau besar dapat dimaknai sebagai strategi pertahanan negara yang dibangun dengan memanfaatkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, termasuk pemanfaatan pulau-**

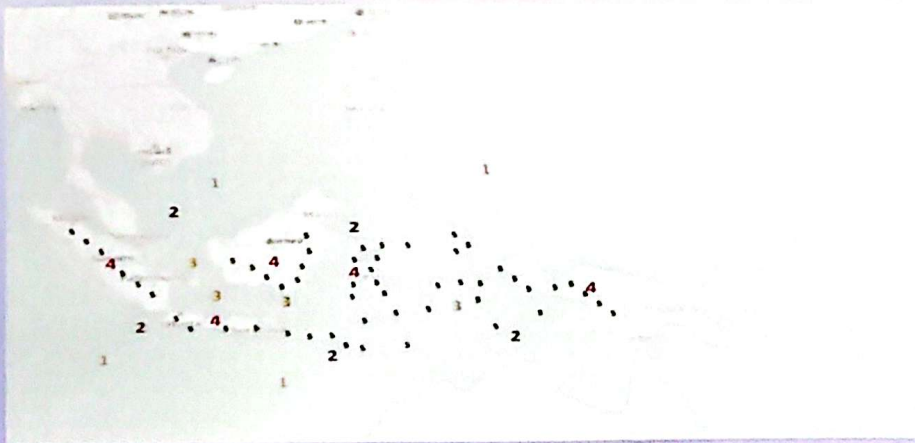
(7) Paul K. Davis, *New Challenges for Defense Planning: Rethinking How Much Is Enough* (Santa Monica, California: Rand, 1994), h. 76

(8) Paul K. Davis, Jonathan Kulick, and Michael Egner, *Implications of Modern Decision Science for Military Decision-Support Systems* (Santa Monica, California: Rand, Project Air Force, 2005), h. 59



**pulau besar dan selat-selat strategis, yang bertujuan untuk melindungi seluruh wilayah NKRI melalui seluruh aspek darat, laut, dan udara.**

Strategi ini memiliki kompatibilitas yang sangat baik dengan Doktrin Sishankamrata dan juga Strategi Penangkalan dan Strategi Pertahanan Berlapis dalam bentuk Mandala Perang sebagaimana tercantum dalam Doktrin Tridek TNI. Mandala Perang ini menggambarkan bagaimana pulau-pulau besar di wilayah teritorial Indonesia memiliki potensi untuk menjadi basis-basis terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut dengan kemampuan menopang wilayahnya sendiri.



Ilustrasi Lapisan Pertahanan Indonesia berdasarkan peta Badan Informasi Geospasial dengan modifikasi (9).





## LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Dengan memperhatikan konteks-konteks yang telah dibahas pada bagian-bagian tersebut diatas, kita dapat menyimpulkan perlunya dua aspek persiapan dimana Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar dapat mencapai potensial penuhnya dengan memperhatikan medan pertempuran hiperaktif di masa depan. Kedua aspek tersebut adalah:

1. Penyiapan Kawasan: Kawasan tertentu pada wilayah pulau-pulau besar Indonesia dan selat-selat strategis perlu dipersiapkan untuk menjadi bagian dari Mandala Pertahanan sebagai bagian dari Strategi Pertahanan Berlapis. Kawasan pulau-pulau besar dan selat strategis akan menjadi Mandala Pertahanan Luar, Mandala Pertahanan Dalam, dan Mandala Pertahanan Utama meliputi konteks penyiapan daerah pangkal perlawanan dan kesinambungan perlawanan <sup>(10)</sup>.

(10) Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara, h. 57



2.Kapabilitas Pengendalian: Kapabilitas ini terkait kemampuan TNI mengendalikan situasi di dalam wilayah teritorial Indonesia dan juga kapabilitas dalam mengkoordinasikan dan memfokuskan kekuatan pertahanan nasional. Termasuk di dalam konteks ini adalah pengembangan kapabilitas *Command, Control, Communications, Computers, Cybersecurity, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C5ISR)* dalam organisasi TNI dan juga secara khusus pengembangan kapabilitas Anti-Access/Area Denial (A2/AD) TNI pada wilayah-wilayah pulau-pulau besar dan selat-selat strategis.

## **PENYIAPAN KAWASAN**

Dalam kaitannya dengan aspek penyiapan kawasan, penyiapan mandala-mandala pertahanan ini dapat diwujudkan melalui pembangunan satuan-satuan teritorial baru. Pembentukan satuan-satuan teritorial ini termasuk dengan membentuk Kodam-Kodam baru dan hingga 100 Batalyon baru secara merata di pulau-pulau besar sebagai konsekuensi kondisi geografis Indonesia yang persebarannya pulau dan bentang alamnya menjadi tantangan tersendiri terkait mobilisasi kekuatan.

Persebaran kekuatan yang merata akan memudahkan dilaksanakannya mobilisasi kekuatan tempur untuk perang berlarut sekaligus dalam rangka membina daerah pangkal



perlawanan. Pembangunan dan pembinaan daerah pangkal perlawanan melalui satuan komando territorial ini dapat diwujudkan pula dengan membentuk satuan Kompi Produksi dan Pembangunan (KPP) yang memiliki peran dukungan tempur untuk mengintegrasikan daya upaya secara semesta dan terpadu. Keterpaduan ini merujuk pada pandangan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Jenderal Nasution mengedepankan bahwa


**“Angkat kakinya Belanda dari Indonesia bukan karena dikalahkan secara militer, akan tetapi karena Belanda telah dilemahkan sedemikian rupa oleh keterpaduan antara tindakan militer dan penolakan rakyat sehingga tidak ada harapan bagi mereka untuk bertahan <sup>(11)</sup>“**



Keterpaduan tidak serta merta menjadi kekuatan militer, akan tetapi menjadi sebuah *force enabler*. *Force enabler* itu sendiri dapat dimaknai sebagai aspek-aspek yang memungkinkan suatu tujuan dapat dicapai sesuai kehendak asal. Pada pengertian militer tertentu, dimaknai sebagai aspek-aspek dimana seorang komandan mampu mengendalikan situasi operasi militer atau medan pertempuran sesuai dengan kehendaknya. Secara garis besar *force enabler* dapat dipahami sebagai organisasi atau kapabilitas tertentu yang mendukung tercapainya tujuan pergerakan (*course of action*) atau tercapainya tujuan tertentu<sup>(12)</sup>.

(11) Abdul Haris Nasution, *Fundamentals Of Guerrilla Warfare* (New York: Praeger, 1965), h. 15

(12) Colin Marcum, "How Enablers Shape The Deep Fight For BCT", *Infantry*, 2017, diakses 23 Agustus 2022, [https://www.benning.army.mil/infantry/magazine/issues/2017/APR-JUN/pdf/INFEMAG\\_APR-JUN17.pdf](https://www.benning.army.mil/infantry/magazine/issues/2017/APR-JUN/pdf/INFEMAG_APR-JUN17.pdf).



Dalam konteks tersebut, maka *force enabler* dapat memiliki beragam bentuk. Mulai dari kapabilitas industrial, hingga dukungan kesehatan, pangan, pendidikan, pertukangan, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan operasional. Pada konteks ini, maka dapat kita lihat bagaimana *force enabler* ini menjadi penentu dalam dimulainya operasi dan berhasil-tidaknya sebuah operasi militer. Kesemua konteks ini perlu dikokohkan dalam peran-peran territorial yang tersebar merata dan memiliki kapabilitas produksi dan pembangunan melalui KPP.

Pada konteks proyeksi operasi khusus, yang difokuskan pada kekuatan Kopassus, sejatinya diperlukan adanya pengembangan-pengembangan Grup Komposit yang meliputi kekuatan 1 Batalyon Parako, 1 Batalyon Sandha, 1 Batalyon Anti Teror dan 1 Detasemen Bantuan yang memiliki unsur yang lengkap, seperti dukungan transportasi Darat, Laut dan udara, siber serta bantuan tembakan lintas lengkung. Dimana dalam pengelarnya tidak ada hanya di Pusatkan di Jawa melainkan juga dikembangkan diwilayah Sumatera, Kalimantan (IKN) dan sulawesi. Konteks komposit pada satuan ini dan sejenisnya

secara khusus dibangun untuk pertahanan pulau-pulau besar dan pergerakan seluruh wilayah Indonesia. Satuan komposit kopassus ini akan memiliki kapabilitas tradisional Kopassus (Parako, Sandha dan Anti Teror) dengan skala yang dirancang khusus.

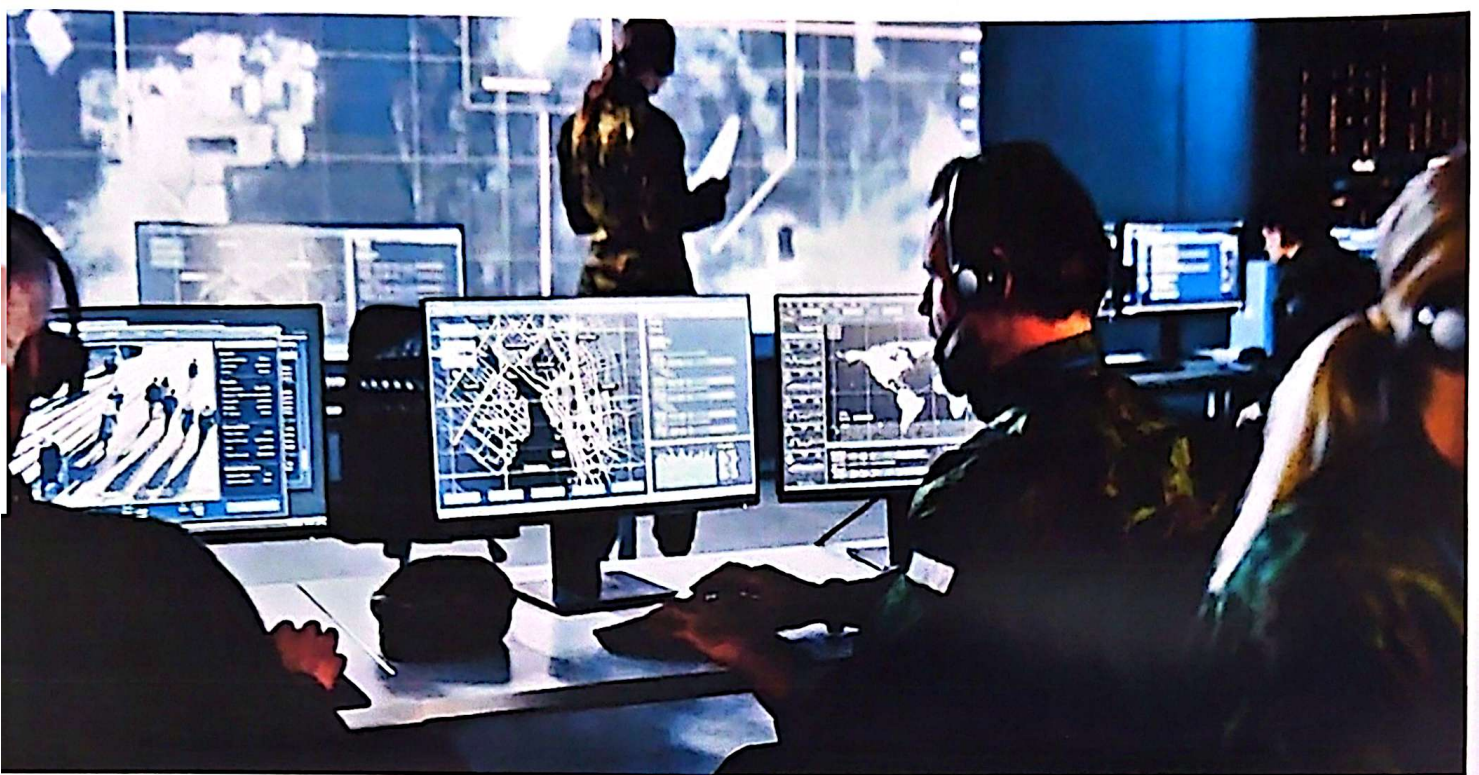
Model komposit ini telah diterapkan dalam pembentukan Batalyon Komposit 1/Gardapati. Dengan proyeksi yang serupa, Batalyon Komposit Kopassus akan memiliki peran tempur dan dukungan tumpur dengan taraf kapabilitas operasi pasukan khusus. Pada model UK, peran dukungan ini dipegang oleh Special Forces Support Group, yang merupakan satuan lintas matra yang secara khusus melekat dan memberikan dukungan pada satuan pasukan khusus. Pembentukan batalyon komposit diharapkan mampu meningkatkan tingkat mobilitas, daya jangkau, dan daya gempur Kopassus maupun elemen pasukan khusus lainnya.

Dalam konteks kekuatan laut dan udara, diperlukan juga adanya penguatan dan pembentukan pangkalan dan lanud dengan persebaran yang merata. Pembentukan pangkalan dan lanud ini untuk mengoptimalkan daya

(15) Michael I. Handel, "Intelligence and the Problem of Strategic Surprise," *Journal of Strategic Studies* 7, no. 3 (1984): 229-281, <https://doi.org/10.1080/01402398408437190>.

(16) NATO Standardization Office, *Allied Joint Publication 3.20: Allied Joint Doctrine for Cyberspace Operations* (NATO Standardization Office, 2020).





jelajah pesawat tempur, pesawat intai, maupun KRI dalam melaksanakan operasi dalam masa damai maupun peperangan. Pembangunan ini khususnya dilakukan pada titik-titik sensitive seperti di wilayah ALKI dan sekitarnya.

Pembangunan pangkalan maupun lanud ini berkaitan pula dengan proses integrasi kapabilitas TNI khususnya dalam deteksi dini dan penyiapan tata ruang wilayah pertahanan. Proses pembangunan ini akan berkaitan dengan bagaimana tata ruang wilayah pada daerah pembangunan akan dioptimalkan pula untuk mendukung usaha-usaha pertahanan nasional sehingga dapat dipergunakan dalam berbagai macam skenario.





## KAPABILITAS PENGENDALIAN

Pada konteks A2/AD dan gelar kekuatan di pulau-pulau besar dan selat strategis, A2/AD sebagai bagian dari strategi ofensif dapat dilihat pada oleh Russia, NATO, dan irisan keduanya<sup>(13)</sup>. Dalam peta proyeksi kekuatan A2/AD antara Russia dan NATO, kapabilitas penangkal berpusat pada penggunaan alutsista presisi jarak jauh. Secara kategorisasi maka sistem yang digunakan adalah terkait pertahanan udara, penangkal kekuatan maritim, dan senjata pemukul wilayah pertempuran (*theater offensive strike weapons*) seperti rudal balistik jarak pendek atau medium, rudal jelajah (cruise missile), dan munisi presisi tinggi lainnya<sup>(14)</sup>. Kapabilitas-kapabilitas tersebut menjadi lebih terasa pada lingkungan strategis abad 21 dengan tipologi ancaman yang beragam.

**Koordinasi dan kemampuan interoperabilitas yang tinggi diperlukan untuk menghindari 'kejutan-kejutan' strategis. Kejutan-kejutan strategis ini memiliki dampak yang signifikan dalam kelangsungan hidup suatu negara.**

(13) Ian Williams, "The Russia - NATO A2AD Environment," *MissileThreat - CSIS Missile Defense Project*, November 29, 2018, accessed June 26, 2023, <https://missilethreat.csis.org/russia-nato-a2ad-environment/>

(14) *Ibid.*



Dampak ini dikarenakan kejutan strategis merupakan bagian dari force multiplier, melipatgandakan efek dari kekuatan yang digunakan. Serangan yang tidak diantisipasi dapat mengakibatkan kehancuran besar terhadap kekuatan musuh dengan resiko dan sumber daya yang lebih rendah dengan mengacaukan aspek psikologis musuh dan secara sementara mengurangi perlawanannya <sup>(15)</sup>.

Koordinasi dan penguatan kapabilitas memungkinkan dihindarinya kejutan strategis ini melalui penajaman fungsi peringatan dini melalui sistem radar, jaringan informasi elektronik, penginderaan jarak jauh, maupun penajaman peran dan fungsi intelijen. Hal ini merupakan perkembangan yang jamak terjadi di negara-negara maju, demikian pula pada organisasi pakta pertahanan seperti NATO yang mengedepankan doktrin ruang siber (*cyberspace*) sebagai bagian dari doktrin pertahanan terpadu <sup>(16)</sup>.

Di dalam doktrin NATO, fungsi intelijen menempati peran penting. Dalam doktrin ruang siber, intelijen didefinisikan sebagai produk yang dihasilkan dari pengumpulan dan pemrosesan informasi secara terarah mengenai lingkungan dan kemampuan serta niat para pelaku, untuk mengidentifikasi ancaman dan menawarkan peluang untuk dieksploitasi [sebagai kekuatan pertahanan] oleh para pembuat keputusan <sup>(17)</sup>. Secara konkret, doktrin ini memungkinkan untuk dibentuk sebagai sebuah Sistem Peringatan Dini Pertahanan (*Early Warning Defense System/ EWDS*).

EWDS merupakan sistem yang secara komprehensif menerapkan integrasi teknologi, doktrin *cyberspace*, dan *force multiplier* sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. EWDS memungkinkan negara untuk menghindari kejutan-kejutan taktis dan strategis serta disaat yang sama mencapai kapabilitas pertahanan yang mumpuni. Pada titik ini, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar kapabilitas pertahanan yang diperlukan untuk strategi pertahanan pulau-pulau besar dan selat strategis adalah:

1. Kapabilitas deteksi dini (*early warning*): kapabilitas ini berkaitan dengan fungsi sipil maupun militer. Salah satu bentuk kapabilitas ini adalah melalui pembentukan sistem A2/AD, menggunakan sistem radar terpadu lintas matra, dan melalui pemantauan elektronik dan digital.

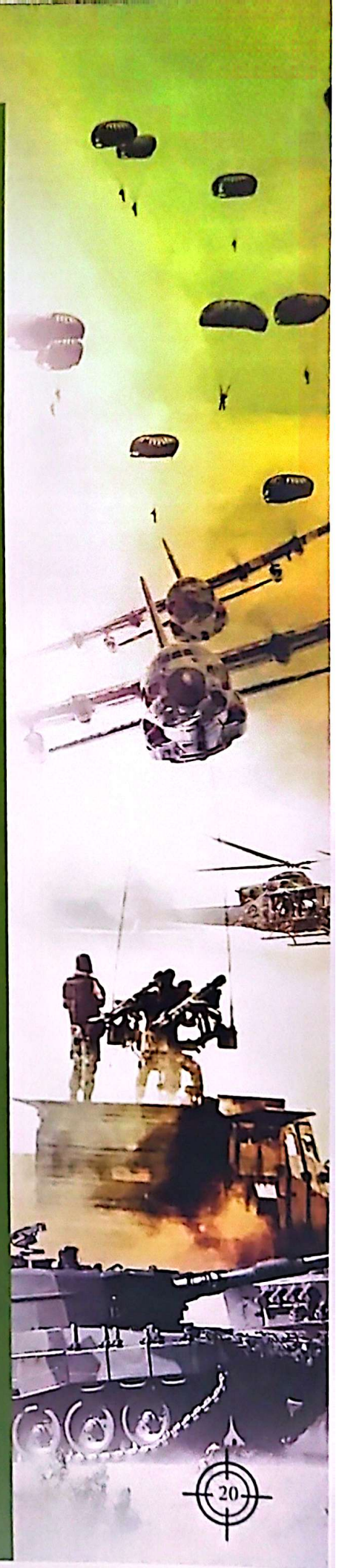
2. Kapabilitas penangkalan dan proyeksi kekuatan: penangkalan dan proyeksi kekuatan ini berkaitan dengan kapabilitas untuk menghadapi berbagai macam bentuk serangan baik fisik maupun digital yang berpotensi dilancarkan. Selain berbentuk intersepsi langsung yang dapat dilaksanakan oleh Angkatan Udara



maupun Angkatan Laut, penyiapan baterai-baterai rudal penangkis serangan udara dan satuan-satuan rudal balistik maupun rudal jelajah perlu pula dipertimbangkan. Selain itu, diperlukan adanya unsur operasi khusus yang mampu melaksanakan misi diluar batas wilayah territorial Indonesia sebagai kekuatan penangkal di lapangan.

Dalam konteks ini, TNI harus mampu memiliki kapabilitas *force projection* diluar batas wilayah negara.

3. Interoperabilitas antar matra dan lintas aktor: interoperabilitas pada konteks ini berlaku pada ancaman militer dan nonmiliter, sekaligus pada konteks OMP dan OMSP. Interoperabilitas termasuk kedalam konteks kapabilitas mengingat penyiapan kapabilitas dalam konteks personel dan sistem pertahanan maupun alutsista harus dihadapkan dalam konteks keterbatasan sumber daya pertahanan dan dengan demikian diperlukan adanya efisiensi dan peningkatan kapasitas.



Kepabilan penangkalan, proyeksi kekuatan, dan interoperabilitas ini akan menjadi ujung tombak pada Lapisan Pertama, Kedua, dan Ketiga dalam strategi pertahanan berlapis Indonesia. A2/AD pada konteks ini akan membutuhkan integrasi kapabilitas yang tinggi antara TNI AL dengan TNI AU dengan mengombinasikan pertempuran Udara-Udara (superioritas udara), Laut-Laut (superioritas laut), dan Udara-Laut atau Laut-Udara.

Pada konteks pengamanan ALKI, penguatan kapabilitas TNI AL akan sangat diharapkan untuk menciptakan choke hold kapanpun diperlukan. Disaat yang sama, perlindungan udara mutlak diperlukan dengan dukungan sebagaimana disebutkan diatas, baterai-baterai rudal penangkis serangan udara dan satuan-satuan rudal balistik maupun rudal jelajah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, kita dapat memahami bahwa Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar merupakan strategi yang memiliki kesesuaian tinggi dengan kondisi realita Indonesia. Kesesuaian ini terkait dengan kondisi geografis, perjalanan sejarah bangsa, dan kondisi sosiologis bangsa Indonesia.

Tuntutan perkembangan teknologi dan metodologi peperangan juga menuntut kita untuk segera beradaptasi untuk memastikan keberlangsungan hidup bangsa. Momentum untuk beradaptasi



seringkali tidak terlihat dan tidak terasa, menjadi tugas bagi setiap prajurit TNI untuk memiliki sensitivitas ini dan melaksanakan apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa TNI selalu siap menjadi garda terdepan pertahanan dan keutuhan bangsa.

Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar menjadi jawaban atas kebutuhan adaptasi ini. Pengembangan kemampuan TNI AD, TNI AL, dan TNI diperlukan untuk mempertahankan teater Mandala Pertahanan Luar, Mandala Pertahanan Utama, dan Mandala Pertahanan Dalam. Persiapan ini termasuk dengan mempersiapkan Komando Teritorial dan Batalyon pendukung yang baru, Pangkalan Laut maupun Pos Laut, dan Pangkalan Udara baru dengan persebaran merata untuk secara efektif mencakup seluruh wilayah Indonesia. Cakupan ini merujuk kepada kecepatan respon dan kemampuan mobilisasi.

Selain itu, pembangunan kapabilitas A2/AD dan penguatan perspektif bahwa TNI mampu melaksanakan force projection diluar batas territorial untuk menghancurkan lawan sebelum memasuki mandala pertahanan penting untuk dikembangkan. Pembangunan kapabilitas dan perspektif ini didukung dengan kerangka Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar dengan Doktrin Sishankamrata sebagai kerangka berpikir pertahanan nasional.



Dengan strategi-strategi turunannya dan perencanaan yang matang, Indonesia akan mampu untuk menghadapi dinamika-dinamika perubahan dan tantangan peperangan masa depan. Semoga dengan telaah singkat ini dapat membuka wawasan untuk mengkaji lebih dalam strategi ini.

